At Tabsyir Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kudus
ISSN : 2338-8544
E-ISSN : 2477-2046
DOI : http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v12i2.33443
Vol. 12 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 241-258
http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi

Tinjauan Etika Terhadap Retorika Pejabat dalam Komunikasi Publik: Studi Pernyataan Prabowo Subianto dan Hasan Nasbi

Julio Firsta Abdillah[1], Al Muroby Al Muslim[2], Fajar Junaedi[3]
Universitas Muhammadiyah Yogyarkata, Indonesia
[1]abdillah4224@gmail.com, [2]almuroby04@gmail.com, [3]fajarjunkuliah@umy.ac.id

Abstract

AN ETHICAL REVIEW OF OFFICIAL RHETORIC IN PUBLIC COMMUNICATION: A STUDY OF PRABOWO SUBIANTO AND HASAN NASBI'S STATEMENT. This study analyzes the public communication rhetoric of two Indonesian figures, namely Prabowo Subianto and Hasan Nasbi, by highlighting how their communication styles interact with the principles of communication ethics, public perception, and moral responsibility in a democratic space. Using a qualitative approach based on discourse studies and social media observations. This study finds that both figures demonstrate different rhetorical styles but contain similar ethical risks. Prabowo prioritizes emotional rhetoric with populist approach, which sometimes simplifies complex issues such as deforestation for the sake of economic nationalism arguments. Meanwhile, Hasan Nasbi tends to use elitist and provocative rhetoric, which in certain cases, such as the joke regarding sending a pig's head to the Tempo editorial office, actually shows insensitivity to humanitarian values and press freedom. Both approaches, although effective in shaping public opinion, tend to violate the principle of rhetorical responsibility that emphasizes empathy, honesty, and respect for public dignity.

Keywords: Communication ethics, political rhetoric, public trust, Prabowo Subianto, Hasan Nasbi, Al-Farabi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis retorika komunikasi publik dua tokoh Indonesia, yakni Prabowo Subianto dan Hasan Nasbi, dengan menyoroti bagaimana gaya komunikasi keduanya berinteraksi dengan prinsip etika komunikasi, persepsi publik, dan tanggung jawab moral dalam ruang demokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi wacana dan analisis media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa kedua tokoh menunjukkan gaya retorika yang berbeda namun mengandung risiko etis serupa. Prabowo lebih mengedepankan retorika emosional dengan pendekatan populis, yang kadang menyederhanakan persoalan kompleks seperti deforestasi demi argumentasi nasionalisme ekonomi. Sementara itu, Hasan Nasbi cenderung memakai retorika elitis dan provokatif, yang dalam kasus tertentu, seperti candaan terkait pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo, justru memperlihatkan insensitivitas terhadap nilai kemanusiaan dan kebebasan pers. Kedua pendekatan tersebut, meskipun efektif dalam membentuk opini publik, cenderung melanggar prinsip tanggung jawab retoris yang menekankan empati, kejujuran, dan penghargaan terhadap martabat publik.

Kata Kunci: Etika komunikasi, retorika politik, kepercayaan publik, Prabowo Subianto, Hasan Nasbi, Al-Farabi

A. Pendahuluan

Komunikasi publik merupakan elemen penting dalam membentuk persepsi publik terhadap pemerintah dan lembaga lainnya (Waqar Fazal & Aslam, 2023). Di era digital yang berkembang pesat, para pemimpin negara telah menyatakan bahwa mereka bukan hanya konsumen masyarakat umum tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini publik (Hanna, 2018). Retorika yang digunakan oleh komentator publik sering mencerminkan pendapat, sikap, bahkan sikap pemerintah, sehingga menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat umum (Hauser, 1998).

Ada beberapa pernyataan yang dibuat oleh publik yang menimbulkan kontroversi, baik karena tidak akurat atau karena menyesatkan kelompok yang bersangkutan atau karena menyajikan informasi yang tidak terverifikasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana retorika Pejabat merusak etika komunikasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap media dan lembaga pemerintah (Ihlen & Heath, 2019). Retorika yang digunakan tanpa memperhatikan aspek etis, seperti kejujuran, keadilan, dan integritas, berpotensi menjadi alat manipulasi dan menyesatkan masyarakat. Menurut pemikiran Al-Farabi, retorika seharusnya menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran secara jujur dan mempromosikan nilai-nilai moral,

bukan sekadar membangun citra atau mempengaruhi opini dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Ketika pejabat publik menggunakan retorika yang menyesatkan atau tidak berbasis data, mereka telah mengkhianati nilai-nilai dasar komunikasi etis dan merusak fondasi kepercayaan yang seharusnya terjalin antara pemerintah, media, dan masyarakat .

Dampak dari komunikasi publik yang buruk dapat terlihat pada berbagai kasus di dunia, di mana pernyataan kontroversial pejabat justru memperburuk polarisasi sosial dan menurunkan legitimasi pemerintah (Robison & Mullinix, 2016). Misalnya, penggunaan retorika emosional tanpa dasar argumentatif yang kuat hanya akan memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah dan menimbulkan krisis kepercayaan yang berkepanjangan. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka, transparan, dan berbasis data, seperti yang dicontohkan oleh beberapa pemimpin dunia, terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan kerja sama masyarakat dalam situasi krisis.

Selain itu, penyebaran informasi palsu atau disinformasi yang dilakukan oleh pejabat atau tokoh publik dapat memperburuk polarisasi politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Disinformasi yang meluas, terutama melalui media sosial, menjadi ancaman serius bagi opini publik dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pejabat publik untuk mengedepankan komunikasi yang etis, berbasis fakta, dan bertanggung jawab agar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.

Dengan demikian, retorika pejabat yang tidak mengindahkan etika komunikasi tidak hanya merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga mengancam legitimasi serta kepercayaan publik terhadap media dan institusi negara. Upaya perbaikan harus dilakukan melalui peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, serta komitmen pejabat untuk selalu mengedepankan komunikasi yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab.

1. Tinjauan Etika Terhadap Retorika Pejabat dalam Komunikasi Publik

Dalam era demokrasi modern, komunikasi publik menjadi instrumen vital yang menghubungkan pemerintah dengan rakyat (Siddiqy et al., 2025). Setiap kata yang diucapkan oleh pejabat publik memiliki kekuatan untuk membentuk opini, menggerakkan massa, dan mempengaruhi stabilitas sosial-politik suatu negara. Namun, kekuatan retorika ini juga membawa tanggung jawab etis yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif yang dapat memecah belah masyarakat.

Retorika politik dalam konteks Indonesia menghadapi tantangan unik, mengingat keberagaman etnis, agama, dan budaya yang menjadi karakteristik fundamental bangsa ini (Hoon, 2017). Pernyataan-pernyataan publik yang dilontarkan oleh para pemimpin tidak hanya berdampak pada citra personal mereka, tetapi juga dapat berimplikasi pada harmoni sosial dan persatuan nasional. Oleh karena itu, analisis etika komunikasi publik menjadi semakin relevan untuk mengkaji apakah retorika yang digunakan sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.

Studi ini mengambil fokus pada dua figur publik yang memiliki pengaruh signifikan dalam diskursus politik Indonesia: Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan Hasan Nasbi sebagai pejabat daerah. Kedua tokoh ini dipilih karena representasi mereka terhadap tingkatan kepemimpinan yang berbeda, namun sama-sama memiliki dampak substansial dalam membentuk wacana publik. Pernyataan-pernyataan kontroversial yang pernah mereka keluarkan memberikan ruang analisis yang kaya untuk memahami dinamika etika dalam komunikasi politik Indonesia.

Pentingnya kajian ini terletak pada urgensi untuk menetapkan standar etika yang jelas dalam komunikasi publik, khususnya di tengah maraknya polarisasi politik dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Melalui analisis mendalam terhadap retorika kedua tokoh tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademis dalam membangun kerangka evaluasi etis yang dapat diterapkan untuk menilai komunikasi publik para pejabat. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi komunikasi politik, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami batas-batas etis dalam retorika politik Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis retoris komunikasi publik menggunakan studi kasus pernyataan Prabowo Subianto dan Hasan Nasbi. Karena pernyataan yang kontroversial dan panjang, mereka telah menjadi sorotan publik. Diharapkan penelitian ini akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kepercayaan publik di era informasi saat ini, analisis retoris, dan etika komunikasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, dan studi pustaka. Dokumentasi dilakukan pada pernyataan Hasan Nasbi dan Prabowo Subianto pada periode semester awal

tahun 2025, yang didapatkan dari berbagai pemberitaan media. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan mengkaji menggunakan pendekatan etika, khususnya etika retorika. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji fenomena terkini dalam dinamika retorika pejabat publik di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Retorika Pejabat dalam Komunikasi Publik Kontemporer

Komunikasi publik yang dilakukan oleh pejabat negara memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat. Dalam era digital, pernyataan publik bukan hanya dikonsumsi oleh audiens secara langsung, tetapi juga tersebar luas melalui media sosial, sehingga efeknya melampaui konteks aslinya (Braun & Gillespie, 2011). Dalam kasus Prabowo Subianto dan Hasan Nasbi, pernyataan mereka mendapatkan atensi luas karena mengandung elemen retoris yang kuat, tetapi juga kontroversial.

Prabowo, misalnya, dikenal menggunakan gaya komunikasi yang lugas dan kadang emosional, yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk ketegasan, namun oleh sebagian lainnya dianggap terlalu konfrontatif. Sementara itu, Hasan Nasbi sebagai analis politik sering kali menyampaikan pernyataan yang bernada provokatif namun mengandung agenda komunikasi tertentu. Pola-pola retorika seperti ini menarik untuk dianalisis karena berpotensi menciptakan bias kognitif di tengah masyarakat.

Komunikasi publik dalam konteks kontemporer telah mengalami transformasi fundamental yang mengubah cara pejabat berinteraksi dengan masyarakat. Era digital membawa paradigma baru dalam penyampaian pesan politik, di mana media sosial, platform digital, dan teknologi komunikasi modern menjadi saluran utama dalam membangun hubungan antara pemerintah dan rakyat. Transformasi ini tidak hanya mengubah medium komunikasi, tetapi juga mengubah karakteristik pesan, kecepatan penyebaran informasi, dan dampak yang ditimbulkan oleh setiap pernyataan publik.

Platform digital telah menciptakan ruang komunikasi yang lebih demokratis namun sekaligus lebih kompleks. Pejabat publik kini dapat menyampaikan pesan secara langsung kepada jutaan audiens tanpa melalui filter media tradisional, memberikan mereka kendali penuh atas narasi yang ingin dibangun. Namun, kebebasan ini juga membawa risiko yang lebih besar, karena setiap pernyataan dapat dengan mudah direkam, disebarkan, dan

dianalisis oleh publik secara real-time. Fenomena viralisasi konten telah mengubah dinamika komunikasi politik, di mana pernyataan yang kontroversial atau tidak tepat dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan reaksi massal.

Retorika pejabat dalam komunikasi publik kontemporer memiliki karakteristik yang berbeda dari era sebelumnya. Pertama, terdapat kecenderungan personalisasi yang kuat dalam komunikasi politik, di mana pejabat lebih sering menggunakan pendekatan personal dan emosional daripada formal dan institusional. Gaya komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan kedekatan dengan masyarakat, namun juga dapat menimbulkan risiko ketika batas-batas profesionalisme menjadi kabur (Crozier, 2007).

Kedua, polarisasi politik yang meningkat telah mempengaruhi cara pejabat menyampaikan pesan mereka. Dalam lingkungan politik yang terpolarisasi, retorika cenderung menjadi lebih ekstrem dan divisif untuk memperkuat basis dukungan. Fenomena ini dapat diamati dalam penggunaan bahasa yang lebih emosional, pembingkaian isu menjadi dikotomi hitam-putih, dan kecenderungan untuk menyerang lawan politik daripada membangun dialog konstruktif (Crozier, 2007).

Ketiga, kecepatan komunikasi di era digital menuntut respons yang cepat dari pejabat publik. Tekanan untuk memberikan tanggapan segera terhadap isu-isu aktual seringkali mengorbankan pertimbangan yang matang dan hati-hati. Hal ini dapat mengakibatkan pernyataan yang kurang tepat atau bahkan merugikan, yang kemudian memerlukan klarifikasi atau bahkan permintaan maaf (Crozier, 2007).

2. Analisis Etika Komunikasi dalam Pernyataan Prabowo Subianto

a. Gaya Retorika Prabowo dan Penerimaannya di Masyarakat

Prabowo Subianto kerap menggunakan retorika yang bersifat populis dan patriotik. Dalam beberapa pidatonya, Prabowo Subianto menekankan pentingnya nasionalisme, keberanian, dan pengorbanan untuk negara. Gaya ini cukup efektif dalam membangun kedekatan emosional dengan pendengarnya. Namun, berdasarkan analisis wacana dan tanggapan media sosial, gaya retorika ini kerap ditafsirkan sebagai dramatis dan kadang menimbulkan polarisasi.

Sebagai contoh, dalam salah satu pidatonya pada masa kampanye, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sedang “dijajah oleh elite global.”

Pernyataan tersebut menimbulkan keprihatinan karena tidak disertai data yang kuat, dan cenderung memperkuat teori konspirasi. Dari perspektif etika komunikasi, ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *veracity* (kebenaran), karena menyampaikan klaim besar tanpa bukti konkret.

Selain itu contoh pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menyatakan bahwa perluasan kelapa sawit tidak perlu ditakutkan meski dituding sebagai penyebab deforestasi, mencerminkan bentuk komunikasi politik yang menekankan pada pendekatan ekonomi-sektoral, namun berisiko mengabaikan dimensi ekologis dan etis dalam tata kelola lingkungan. Pernyataan bahwa "sawit juga pohon, berdaun, dan menyerap karbon" secara retoris tampak logis, namun mengaburkan kompleksitas kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh konversi hutan alam menjadi perkebunan monokultur. Dalam perspektif etika komunikasi publik, ujaran tersebut berpotensi menyesatkan publik karena menyederhanakan krisis lingkungan menjadi sekadar persoalan karbonisasi, tanpa mempertimbangkan keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, dan daya rusak ekologis jangka panjang yang tercatat dalam banyak riset ilmiah global.

Dalam konteks kepemimpinan ekologis yang bertanggung jawab, pernyataan ini juga memperlihatkan kekurangan dalam sensitivitas terhadap suara komunitas internasional maupun lokal yang telah lama memperjuangkan keberlanjutan sebagai bagian dari etika pembangunan. Lebih lanjut, pidato semacam ini, ketika diucapkan dihadapan pejabat negara dan aparat, dapat memberi legitimasi struktural terhadap perluasan perkebunan sawit tanpa filter ekologis, yang secara etis berpotensi melanggengkan model pembangunan yang eksploitatif. Oleh karena itu, retorika Prabowo Subianto meski bersifat afirmatif terhadap nilai ekonomi nasional, tetap patut dikritisi karena mengabaikan prinsip kehati-hatian ekologis yang menjadi fondasi etika keberlanjutan abad ke-21.



Gambar 1. Tangkapan layar Presiden Prabowo sedang memberikan pidato pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Jakarta pada Senin (30/12/ 2024)

b. Telaah dengan Perspektif Etika Al-Farabi

Menurut Al-Farabi, tujuan utama retorika adalah untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang dapat dipahami masyarakat umum. Retorika tidak boleh menjadi sarana untuk memperkuat kekuasaan atau mempermainkan emosi publik (Marzouka & Díaz, 2023). Dalam kasus Prabowo, pernyataan yang bersifat hiperbolis dan emotif dapat dinilai sebagai penyimpangan dari prinsip etika filosof Muslim tersebut.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong perluasan kelapa sawit tanpa perlu takut terhadap tudingan deforestasi memunculkan perdebatan tidak hanya dalam ranah lingkungan, tetapi juga dalam dimensi etika kepemimpinan publik. Dalam konteks ini, etika Al-Farabi menjadi landasan penting untuk menelaah bagaimana seorang pemimpin seharusnya menimbang kebijakan bukan hanya dari sisi manfaat material, tetapi juga dari nilai-nilai kebaikan bersama (*al-khayr al-musytarak*) dan keutamaan (*al-fadilah*) (Marzouka & Díaz, 2023).

Dalam filsafat politiknya, Al-Farabi menekankan bahwa tujuan utama dari negara dan pemimpinnya adalah mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan kolektif (*sa'adah al-mujtama'*), yang mencakup aspek jasmani, ruhani, dan keberlanjutan moral kehidupan manusia. Ketika Prabowo menyederhanakan kritik terhadap deforestasi hanya sebagai tudingan yang tidak perlu ditakuti, serta menyamakan pohon sawit dengan pohon-pohon alami lainnya karena sama-sama menyerap karbon, ia tampak mengabaikan prinsip etis penting dalam pemikiran Al-Farabi yaitu hikmah (kebijaksanaan ekologis) dan 'adalah (keadilan terhadap semua makhluk termasuk alam). Perspektif Al-Farabi akan mengharuskan seorang pemimpin mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan yang diambil, terutama bila kebijakan itu mengancam keteraturan kosmik (nizam al-'alam) dan keharmonisan antara manusia dan alam (Marzouka & Díaz, 2023)

Lebih jauh lagi, Al-Farabi menekankan bahwa seorang pemimpin yang ideal adalah sosok yang tidak hanya memiliki kekuatan dan visi, tetapi juga

kecakapan intelektual dan moral untuk membedakan antara maslahat sejati dan manfaat semu yang bersifat sesaat (Herman et al, 2007). Oleh karena itu, jika kebijakan perluasan sawit mendorong eksploitasi lingkungan, menggusur hutan hujan tropis, dan mengabaikan hak-hak ekologis generasi mendatang, maka dari kacamata etika Al-Farabi, kebijakan itu bertentangan dengan peran esensial seorang pemimpin sebagai penjaga keseimbangan dan penuntun pada kehidupan yang baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, retorika Prabowo, walau ditujukan untuk memperkuat ekonomi nasional, secara etis patut ditinjau ulang agar sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan filosofis yang berakar pada kebijaksanaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia serta alam ciptaan Tuhan.

Dengan demikian, secara normatif, gaya retorika Prabowo perlu dikaji ulang agar tidak menyimpang dari prinsip komunikasi etis. Kejujuran, kejelasan argumen, dan tanggung jawab moral menjadi landasan penting yang seharusnya mengarahkan komunikasi publik, khususnya dari tokoh yang memiliki pengaruh besar.

3. Retorika Hasan Nasbi dalam Dimensi Etika Komunikasi

a. Strategi Komunikasi Elitis dan Provokatif

Hasan Nasbi, sebagai analis politik dan pendiri lembaga Cyrus Network, memiliki gaya retorika yang lebih cenderung menggunakan pendekatan elitis dan provokatif. Pada bulan Maret 2025, ketika terjadi teror pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo, Hasan Nasbi menanggapi dengan kalimat sebagai berikut “Sudah dimasak saja”. Pernyataannya ini maksudnya kepala babi itu bisa saja dimasak. Berbagai pihak mengecam, dengan menyebut pernyataan ini sangat tidak empatik. Hasan Nasbi dianggap oleh media massa dan warganet seakan-akan meremehkan teror terhadap jurnalis. Pernyataan Hasan Nasbi dinilai melemahkan nilai kebebasan pers, dan bukan sikap yang pantas dari seorang pejabat komunikasi negara. Dari perspektif etika komunikasi, gaya seperti ini mengandung risiko manipulatif. Komunikasi tidak lagi digunakan sebagai medium pencerdasan publik, tetapi sebagai alat untuk mengarahkan opini demi kepentingan tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana retorika bisa menjadi instrumen kekuasaan yang jauh dari prinsip moral publik.



Gambar 1. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Pada saat di wawancara (Sumber; Kompas)

Pernyataan Hasan Nasbi yang berkelakar "sudah dimasak aja" menanggapi insiden pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo menimbulkan perdebatan serius dalam dimensi etika komunikasi publik. Retorika tersebut secara kasat mata terlihat sebagai bentuk humor, namun dalam konteks komunikasi etis, ia menunjukkan ketidaksensitifan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan kebebasan pers. Kepala babi bukan hanya benda fisik, melainkan simbol penghinaan yang membawa beban kultural dan religius, terutama dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dalam teori etika komunikasi (Christians, 2019), pernyataan semacam ini bertentangan dengan prinsip penghargaan terhadap martabat manusia, di mana seseorang seharusnya tidak dijadikan objek lelucon atas penderitaannya. Ketika seorang figur publik seperti Nasbi menggunakan humor dalam situasi yang sarat ancaman dan simbol kekerasan, hal itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengabaian terhadap solidaritas kemanusiaan dan perlindungan terhadap pekerja media.

Lebih jauh lagi, dari perspektif komunikasi antarbudaya (Dai & Weng, 2016), respons Nasbi menunjukkan minimnya sensitivitas terhadap nilai-nilai kolektif masyarakat yang melihat insiden tersebut sebagai bentuk teror simbolik terhadap institusi pers. Dalam situasi di mana ruang demokrasi terus diuji, tanggung jawab retoris seorang tokoh publik semestinya mengedepankan empati, bukan candaan yang meremehkan peristiwa serius. Oleh karena itu, pernyataan Hasan Nasbi tidak hanya problematik secara etis, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam membangun komunikasi publik yang beradab dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta kebebasan berekspresi.

Pernyataan Hasan Nasbi yang menyarankan "sudah dimasak aja" sebagai tanggapan atas insiden pengiriman kepala babi ke kantor Tempo memunculkan persoalan etis yang kompleks dalam lanskap komunikasi publik kontemporer. Dari sudut pandang etika komunikasi publik, khususnya menurut teori *Ethics in Human Communication* dari Johannesen, ucapan tersebut mengandung pelanggaran terhadap prinsip *respect for persons*, yaitu bahwa individu dan kelompok harus dihargai secara utuh, bukan dijadikan objek kelakar atas penderitaan atau teror simbolik yang mereka alami (Johannesen, 2001). Dalam konteks ini, kepala babi bukan sekadar objek fisik, melainkan simbol penghinaan yang sangat kuat secara kultural dan religius, terutama dalam masyarakat Muslim Indonesia, sehingga menjadikan insiden tersebut sebagai bahan candaan merupakan bentuk insensitivitas retoris yang serius.

Teori komunikasi antarbudaya juga menegaskan pentingnya kesadaran akan nilai-nilai kolektif dan kepercayaan masyarakat oleh (Ting-Toomey, 2010), yang dalam kasus ini terabaikan oleh retorika Nasbi. Ketika seorang figur publik gagal menunjukkan empati dan tanggung jawab komunikatif di tengah peristiwa yang memuat dimensi ancaman terhadap kebebasan pers, maka ia telah mengabaikan etika publik dalam komunikasi politik. Selain itu, dalam perspektif teori performatif dari Austin (1962), ucapan publik memiliki kekuatan membentuk realitas sosial. Maka ketika candaan disampaikan dalam konteks ancaman, hal itu tidak netral—melainkan berpotensi menormalkan kekerasan simbolik dan menurunkan keseriusan publik terhadap kasus tersebut.

Ucapan tersebut juga berseberangan dengan gagasan public reason dari Habermas, yang menekankan bahwa ruang publik harus dibangun di atas argumentasi rasional dan etis, bukan pelecehan simbolik atau trivialisasi penderitaan. Dengan demikian, retorika Hasan Nasbi dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi yang tidak etis karena gagal membangun dialog publik yang adil, empatik, dan transformatif. Dalam konteks demokrasi yang sedang diuji oleh ancaman terhadap kebebasan pers, sikap seorang tokoh publik semestinya justru memperkuat solidaritas sosial dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, bukan mereduksi peristiwa serius menjadi lelucon yang menyakitkan secara kolektif.

b. Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Hasan Nasbi cukup rendah dibanding tokoh-tokoh publik lainnya, khususnya di kalangan responden muda. Hal ini berkorelasi dengan gaya komunikasi yang dianggap terlalu teknokratis dan manipulatif. Dalam etika komunikasi menurut (White, 1995a), komunikasi publik yang baik haruslah inklusif, jujur, dan bertanggung jawab terhadap efek sosialnya—nilai-nilai yang dinilai kurang terefleksi dalam gaya retorika Nasbi.

Pernyataan Hasan Nasbi yang merespons insiden pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo dengan kelakar "sudah dimasak aja" menciptakan dampak serius terhadap konstruksi kepercayaan publik (*public trust*) terhadap tokoh dan institusi yang seharusnya menjunjung nilai-nilai moral dan demokrasi. Dalam perspektif teori komunikasi etis yang dikemukakan oleh (White, 1995b), kepercayaan publik bertumpu pada kejujuran komunikator, tanggung jawab atas dampak pesan, serta kepedulian terhadap nilai-nilai kolektif. Ketika pesan disampaikan dalam bentuk humor yang menyepelekan kekerasan simbolik, apalagi dalam konteks ancaman terhadap kebebasan pers, maka komunikasi tersebut tidak hanya dianggap tidak empatik, tetapi juga mengganggu rasa aman psikologis masyarakat.

Teori kredibilitas komunikator dari (Delia, 1976) menyatakan bahwa persepsi publik terhadap kredibilitas seseorang dibentuk oleh dimensi *trustworthiness* (dapat dipercaya) dan *expertise* (kompetensi). Candaan yang muncul dalam konteks teror simbolik dapat mengikis *trustworthiness*, karena menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap nilai kemanusiaan dan hak publik atas rasa hormat. Hal ini diperkuat oleh kajian (Houston & Harding, 2013) yang menegaskan bahwa kepercayaan publik dalam demokrasi modern sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap integritas dan akuntabilitas aktor publik. Ketika aktor tersebut gagal menanggapi isu serius dengan cara yang bermartabat, maka dapat terjadi penurunan legitimasi sosial dan munculnya ketidakpercayaan terhadap sistem komunikasi publik itu sendiri. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan religius, simbol kepala babi membawa makna penghinaan yang mendalam, dan meresponsnya dengan kelakar memperlihatkan kegagalan untuk menerapkan prinsip etika dialogis menurut Allwood et al., 2000), yakni komunikasi yang menghargai keberadaan "yang lain" sebagai subjek, bukan objek candaan. Oleh sebab itu, implikasi pernyataan Hasan Nasbi bukan

hanya mencederai komunikasi etis, tetapi juga berpotensi memperlemah relasi sosial-politik antara masyarakat dan figur publik dalam ruang demokrasi yang sehat.

4. Komparasi Retorika Prabowo dan Hasan Nasbi

Dalam membandingkan gaya retorika antara Prabowo Subianto dan Hasan Nasbi, ditemukan sejumlah perbedaan mendasar dalam pendekatan, tujuan, serta dampak komunikatif terhadap masyarakat. Prabowo lebih menekankan retorika emosional dan simbolik, sementara Hasan Nasbi lebih menampilkan retorika rasional yang terkadang provokatif.

Dari sisi pendekatan, Prabowo cenderung menggunakan narasi heroik dan nasionalistik yang memanfaatkan daya tarik emosional untuk membangun kohesi dengan massa. Hal ini sejalan dengan strategi retorika klasik Aristotelian dalam penggunaan pathos untuk membangkitkan emosi audiens. Sebaliknya, Hasan Nasbi lebih menggunakan logos, yaitu logika dan argumentasi rasional, walaupun dalam praktiknya diselipi sindiran dan provokasi.

Tujuan komunikasi keduanya juga berbeda. Prabowo tampaknya bertujuan membangun citra diri sebagai pemimpin tegas dan patriotik, sementara Hasan Nasbi bertujuan membentuk opini publik melalui sudut pandang elitis. Namun, keduanya sama-sama berisiko mengabaikan prinsip etis ketika gaya komunikasi mereka dianggap tidak berdasar fakta atau menyesatkan.

Dampaknya terhadap masyarakat pun menunjukkan tren yang berbeda. Retorika Prabowo lebih banyak menuai dukungan dari kelompok nasionalis dan konservatif, sedangkan retorika Hasan Nasbi memicu diskusi kritis di kalangan intelektual, namun juga menciptakan resistensi dari masyarakat umum yang merasa dimanipulasi. Di sini terlihat bagaimana perbedaan retorika dapat mempengaruhi segmentasi audiens dan respon publik yang muncul di ruang digital.

Dalam menelaah retorika publik antara Prabowo Subianto dan Hasan Nasbi, terlihat kontras tajam baik dari sisi pendekatan komunikatif maupun dampak etis terhadap masyarakat. Prabowo menggunakan gaya retorika populis dan emosional dengan kecenderungan menekankan pada simbolisme

nasionalistik dan narasi keberanian, seperti dalam pernyataannya yang menyamakan kelapa sawit dengan pohon penyerap karbon demi membela kepentingan ekonomi nasional. Hal ini mencerminkan penggunaan unsur pathos dalam retorika klasik Aristotelian yang bertujuan membangkitkan emosi patriotik untuk membentuk solidaritas publik.

Sebaliknya, Hasan Nasbi cenderung memakai retorika elitis dan provokatif, yang mengedepankan unsur logos dengan logika rasional dan sindiran sebagai alat komunikasi—seperti terlihat dalam candaan "sudah dimasak aja" yang merespons ancaman terhadap kebebasan pers. Namun, kedua gaya retoris ini, meskipun berbeda secara metode, sama-sama berpotensi melanggar prinsip etika komunikasi. Komunikasi yang etis harus menghormati martabat manusia dan menghindari manipulasi (Dubov, 2015), sedangkan retorika Prabowo dapat dianggap menyederhanakan persoalan ekologis kompleks, dan Nasbi terkesan menertawakan penderitaan simbolik. Dari segi tujuan, Prabowo tampaknya ingin membangun citra sebagai pemimpin kuat dan solutif di hadapan elite dan aparat negara, sementara Nasbi menggunakan provokasi sebagai alat pembingkaian opini publik.

Jika dilihat melalui lensa teori tindakan komunikatif Habermas (1984), keduanya tidak sepenuhnya mencerminkan komunikasi yang dialogis dan rasional karena masing-masing lebih menonjolkan dominasi narasi daripada keterbukaan terhadap kritik dan klarifikasi. Dalam hal dampak, Prabowo memperoleh simpati dari kalangan nasionalis dan birokrat, namun menuai kritik dari komunitas lingkungan, sementara Nasbi mendapat resistensi luas dari kelompok masyarakat sipil dan jurnalis yang menilai candaan tersebut tidak pantas secara moral. Berdasarkan etika retorika Al-Farabi, yang menekankan bahwa komunikasi seorang pemimpin harus bertujuan pada kebaikan bersama (al-khayr al-musytarak) dan menjauhkan diri dari manipulasi emosional atau intelektual (Woerther, 2024), maka kedua tokoh ini perlu mengoreksi arah komunikasinya agar tidak sekadar membangun persepsi, tetapi juga memelihara nilai-nilai keadaban publik. Dengan demikian, perbandingan retorika ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi publik kontemporer, gaya berbeda belum tentu membawa pesan yang benar secara etis, dan bahwa kekuatan kata seharusnya dikendalikan oleh prinsip kebijaksanaan dan tanggung jawab sosial.

C. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap gaya dan isi retorika Prabowo Subianto dan Hasan Nasbi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik yang tidak berpijak pada prinsip etika dapat membawa dampak serius terhadap legitimasi sosial, stabilitas demokrasi, dan kepercayaan masyarakat. Prabowo dengan gaya retorika populis dan simbolik kerap menggunakan narasi nasionalisme untuk membangun kedekatan emosional, namun hal ini bisa menyesatkan ketika menyederhanakan persoalan berat seperti krisis ekologi. Sebaliknya, Hasan Nasbi dengan retorika provokatifnya menunjukkan kecenderungan manipulatif dalam membingkai opini publik, yang dapat mengabaikan sensitivitas budaya dan nilai kemanusiaan. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikatif bukan hanya ditentukan oleh daya persuasi semata, tetapi harus disertai komitmen etis terhadap kebenaran, empati, dan keadilan. Dalam perspektif Al-Farabi, retorika yang ideal adalah yang menjembatani nalar filosofis dan kepentingan publik secara harmonis, bukan sekadar mempengaruhi atau menghibur. Oleh karena itu, komunikasi publik oleh pejabat negara harus diarahkan pada kemaslahatan bersama (*al-khayr al-musytarak*) dan tidak melukai nilai-nilai kolektif bangsa. Studi ini merekomendasikan agar setiap tokoh publik mengintegrasikan nilai etika filosofis, literasi komunikasi, dan tanggung jawab moral dalam membentuk narasi, khususnya di tengah meningkatnya arus informasi digital yang mudah viral dan terdistorsi. Komunikasi yang bijak dan etis bukan hanya membangun citra, tetapi memperkuat pondasi demokrasi dan relasi beradab antara pemerintah dan rakyat.

Daftar Pustaka

Allwood, J., Traum, D., & Jokinen, K. (2000). Cooperation, dialogue and ethics. *International Journal of Human-Computer Studies*, *53*(6), 871–914. https://doi.org/10.1006/ijhc.2000.0425

Braun, J., & Gillespie, T. (2011). Hosting The Public Discourse, Hosting The Public. *Journalism Practice*, *5*(4), 383–398. https://doi.org/10.1080/17512786.2011.557560

Christians, C. G. (2019). *The Ethics of Human Dignity and Freedom of Expression* (pp. 221–252). https://doi.org/10.1007/978-981-13-3420-7_8

Crozier, M. (2007). Recursive Governance: Contemporary Political Communication and Public Policy. *Political Communication*, *24*(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/10584600601128382

Dai, X., & Weng, J. (2016). The global perspective to intercultural communication: a review and commentary. *Journal of Multicultural Discourses*, *11*(2), 229–235. https://doi.org/10.1080/17447143.2016.1170134

Delia, J. G. (1976). A constructivist analysis of the concept of credibility. *Quarterly Journal of Speech*, *62*(4), 361–375. https://doi.org/10.1080/00335637609383350

Dubov, A. (2015). Ethical persuasion: the rhetoric of communication in critical care. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, *21*(3), 496–502. https://doi.org/10.1111/jep.12356

Hanna, N. (2018). A role for the state in the digital age. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, *7*(1), 5. https://doi.org/10.1186/s13731-018-0086-3

Hauser, G. A. (1998). Vernacular dialogue and the rhetoricality of public opinion. *Communication Monographs*, *65*(2), 83–107. https://doi.org/10.1080/03637759809376439

Hoon, C.-Y. (2017). Putting Religion into Multiculturalism: Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia. *Asian Studies Review*, *41*(3), 476–493. https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761

Houston, D. J., & Harding, L. H. (2013). Public Trust in Government Administrators. *Public Integrity*, *16*(1), 53–76. https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922160103

Ihlen, O., & Heath, R. L. (2019). Ethical grounds for public relations as organizational rhetoric. *Public Relations Review*, *45*(4), 101824. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2019.101824

Johannesen, R. L. (2001). Communication Ethics: Centrality, Trends, and Controversies. *Annals of the International Communication Association*, *25*(1), 201–235. https://doi.org/10.1080/23808985.2001.11679004

Robison, J., & Mullinix, K. J. (2016). Elite Polarization and Public Opinion: How Polarization Is Communicated and Its Effects. *Political Communication*, *33*(2), 261–282. https://doi.org/10.1080/10584609.2015.1055526

Siddiqy, F. A. A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(5), 3190–3202. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1698

Ting-Toomey, S. (2010). Applying Dimensional Values in Understanding Intercultural Communication. *Communication Monographs*, *77*(2), 169–180. https://doi.org/10.1080/03637751003790428

Marzouka, K. C., & Díaz, M. A. (2023). Poetics and politics in al-fārābī's philosophy. *Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Politicas*, *26*(3), 161–168. https://doi.org/10.5209/rpub.91318

Waqar Fazal, M., & Aslam, M. J. (2023). Shaping Public Perception: The Evolution of Government Public Relations in the Digital Age. *Society, Law and Policy Review*, *2*(1), 37–53. https://doi.org/10.62585/slpr.v2i1.33

White, R. A. (1995a). From Codes of Ethics to Public Cultural Truth. *European Journal of Communication*, *10*(4), 441–459. https://doi.org/10.1177/0267323195010004002

White, R. A. (1995b). From Codes of Ethics to Public Cultural Truth. *European Journal of Communication*, *10*(4), 441–459. https://doi.org/10.1177/0267323195010004002

Marzouka, K. C., & Díaz, M. A. (2023). Poetics and politics in al-fārābī's philosophy. *Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Politicas*, *26*(3), 161–168. https://doi.org/10.5209/rpub.91318

Herman, Muhammad et al. (2007). *Epistemologi al-farabi: gagasannya tentang daya-daya manusia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial *17*, 228–241.

Woerther, F. (2024). Ibn Rushd's Middle Commentary on the Poetics, or the Ethical Education. *Journal of Islamic Ethics*, *8*(1–2), 121–145. https://doi.org/10.1163/24685542-20240011

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong